



PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR KABUPATEN ACEH BARAT

Linda Wati Halawa¹, & Cut Mega Putri²

^{1,2} Universitas Teuku Umar

lindawatihalawa@gmail.com

Abstract

The problems examined in this study are the Budget Realization Report, reports on changes in Over budget Balance, Balance Sheet, Operational Reports, APBD is a regional government financial work plan that will be used as a basis for carrying out development in the region. In preparing, discussing, determining and supervising the implementation of the budget, it is not enough just to look at the size of the budget, but the output must also be produced economically, efficiently and effectively for the development of the region. In this study, the authors wish to analyze the performance of the West Aceh district government by using the principle of value for money which is based on three economic ratios, the ratio of efficiency and ratio of effectiveness. The results of the study show that the performance of the West Aceh District government for the 2020-2021 period as a whole is not good.

Keywords: Government Accounting Standards, Value For Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Setiap hari masyarakat terus mengharapkan adanya perubahan yang baik dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa ada perkembangan pesat terhadap sektor publik di Indonesia, sehingga mampu mendorong Pemerintah Pusat serta pemerintah daerah agar menggunakan akuntabilitas public. Jika dilihat dari pandangan ilmu ekonomi, sektor publik dianggap sebagai aktivitas yang berhubungan dengan usaha yang dapat menghasilkan barang serta layanan publik (Sari Murni, 2016) Hak otonomi yang terdapat pada masing-masing daerah atau kabupaten khususnya di Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan kebebasan dalam meningkatkan pendapatan demi tercapainya kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat nya. Baik atau tidaknya kinerja pemerintahan suatu daerah dapat ditandai dengan tingginya realisasi yang dicapai oleh masyarakat nya dalam hal pendapatan.



Transparansi dan akuntabilitas publik yang dikelola oleh sektor publik sangat dibutuhkan dalam memantau kinerja pemerintahan daerah dalam menyalurkan dana publik yang akan digunakan untuk membangun pemerintahan yg lebih baik. Tantangan yang selama ini harus dijawab dan terus menjadi prioritas setiap pemerintah daerah adalah tentang bagaimana menggunakan sumber dana publik dengan cara yang lebih ekonomis, efisiensi, dan juga efektif tentunya dengan pelaksanaan manajemen yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Pada tahun 2006 lalu pemerintah menetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis dan taat terhadap peraturan undang-undang, serta transparan dan juga bertanggung jawab atas keadilan. Pemerintahan menerapkan beberapa prosedur seperti pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan yang dijadikan sebagai standar akuntansi bagi pemerintahan (Manik, 2013). Sektor pelayanan publik yang ada di Indonesia memiliki pandangan yang buruk di mata masyarakat sering dianggap sebagai pemborosan, kebocoran sumber dana, dan instansi yang paling merugi. Terjadinya hal ini bukan tanpa alasan itu semua dikarenakan kurang profesionalnya para petugas yang ada pada sektor pelayanan tersebut.

Value for money merupakan bentuk penilaian masyarakat terhadap kinerja sektor publik dalam mengelola anggaran dana apakah dapat memberikan hasil masyarakat terutama dalam indikator ekonomi yang efektif dan efisien (Mahmudi, 2015). Dalam mengukur kinerja sektor publik, kemampuan Pemerintah Daerah menjadi pengaruh penting dalam prinsip value for money karena di dalamnya terdapat mekanisme manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. Jika suatu daerah memiliki pelayanan publik yang baik dan dapat membentuk keseimbangan antara kekuasaan dengan tanggung jawab terutama dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani maka akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, bahkan dapat memperbaiki reputasi yang selama ini sering dianggap kurang baik di mata masyarakat.

Pada tahun 2020 dan 2021, APBD Aceh Barat fokus dalam peningkatan pelayanan publik dan pada tahun 2022 APBD Aceh Barat lebih memfokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar dapat lebih mensejahterakan masyarakat. Anggaran yang digunakan naik cukup signifikan yaitu lebih dari satu triliun rupiah.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat kian hari semakin membaik dalam membiayai serta mengurus daerah hal ini disebabkan karena pendapatan yang dimiliki Kabupaten Aceh barat setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jumlah kenaikan pendapatan pada Kabupaten Aceh Barat di tahun 2018 adalah sebesar 8,83%, tahun 2019 meningkat sebesar 16,23%, tahun 2020 mengalami kenaikan pendapatan sebesar 10,63%, kenaikan pendapatan yang dialami Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya menandakan bahwa keuangan atau sumber dana daerah telah dikelola dan digunakan dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat telah



dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal. Maksimalnya laju kenaikan pendapatan APBD khususnya Kabupaten Aceh Barat sebanding dengan kenaikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten tersebut.

Dengan jumlah pendapatan yang kian meningkat akan memudahkan pemerintah dalam menyediakan anggaran belanja baik belanja yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, PAD Kabupaten Aceh Barat memperbaiki sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan. Dana sebesar Rp 125.728.179.033 digunakan untuk belanja kebutuhan daerah pada tahun 2019, pembelanjaan tersebut dibagi atas dua kategori yaitu belanja langsung sebesar Rp.12.914.387.810 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.112.813.791.223, maka dengan demikian pelaksanaan APBD harus lebih disiplin dalam menggunakan anggaran, baik di awal masa pelaksanaan maupun di akhir pelaksanaan. Jika para pelaksana dapat menggunakan anggaran dengan disiplin maka tujuan dari penggunaan anggaran dana tersebut dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya tentu dengan hasil yang efektif dan efisien. Pengelolaan APBD harus sesuai dengan kas dan time schedule yang sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik dengan ekonomis dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik dan sangat ingin melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Aceh Barat dengan menggunakan prinsip value for money. Dengan tujuan dapat menilai kinerja sektor publik yang ada di Kabupaten Aceh Barat dengan prinsip Value for Money yang lebih berfokus pada segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh dengan indikator value for money pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran tingkat prestasi atau pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan dan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi baik kecil maupun besar, guna untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Visi dan misi yang telah dibentuk dari organisasi tersebut yang tentunya diterapkan melalui strategi perencanaan dan dapat dinilai dari kualitas dan juga kuantitas dari hasil pencapaian nya.

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai apakah suatu organisasi dapat dikatakan sukses atau tidak. Jika dilihat dalam organisasi sektor publik, tingkat kesuksesan sektor publik biasanya akan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi serta dukungan publik. Saat sektor publik mampu memberikan pelayanan yang baik berkualitas bagus dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakatnya, maka akan diakui tingkat kesuksesan sektor publik tersebut.



Menurut pandangan Rudianto (2013:189) kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi oleh suatu organisasi dalam mengelola aset secara baik dan lebih efektif selama periode tertentu dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan dari sebuah organisasi yang dapat dinilai dari aktivitas keuangan maka dibutuhkan nya kinerja keuangan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Bastian (2016:267) merupakan alat ukur yang dapat menggambarkan tentang pencapaian atau tujuan dalam sebuah organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelum nya. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah gambaran tentang sumber daya dan segala yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan dapat menghasilkan output dan outcome yang berupa SDM, informasi, peraturan undang-undang.
- 2) Indikator keluaran (*output*) adalah gambaran tentang output bisa berupa barang maupun jasa yang telah dihasilkan dari sebuah kegiatan baik fisik maupun non fisik
- 3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan tentang hasil dari perkembangan kinerja sebuah instansi dan dapat dirasakan dalam jangka menengah (efek langsung). Hasil yang diinginkan seperti meningkatnya kuantitas, kualitas, perilaku, efektifitas serta pendapatan.
- 4) Indikator manfaat (*benefit*) merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari kinerja suatu instansi baik positif maupun negatif dimana dampak tersebut bisa dirasakan oleh instansi itu sendiri maupun pihak lain yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan instansi tersebut.

Value For Money

Value for Money ialah sebuah indikator yang dapat mengukur kinerja serta informasi tentang anggaran yang digunakan atau dibelanjakan oleh organisasi pemerintah. Baik atau tidaknya kinerja dari sektor publik atau pemerintahan tidak bisa dinilai dari output yang dihasilkan saja, tapi juga harus memberikan pertimbangan pada *input*, dan *outcome* secara bersamaan. Selain itu dalam beberapa hal juga perlu menambahkan pengukuran distribusi serta cakupan layanan.

Value for Money merupakan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja sektor publik melalui program-program yang dijalankannya sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diperoleh sektor publik. Kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan yang ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Riadi, 2020).



Mardiasmo (2018) membagi *Value For Money* menjadi dua indikator yaitu:

- 1) Indikator alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisien)
- 2) Indikator kualitas pelayanan (Efektifitas)

Tujuan *Value For Money*

Penerapan *value for money* pada sektor publik yang bertujuan untuk mengukur kinerja sektor publik tentu memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga sektor publik itu sendiri manfaat yang di maksud dalam hal ini seperti pengadaan dan alokasi sumber daya yang lebih hemat dan cermat (ekonomis), penggunaan sumber daya yang lebih efisiensi atau memiliki daya guna, tujuan dan sasaran yang dicapai lebih efektif atau berhasil.

Ekonomis

P.A Samuelson (Putong, 2013:3), ekonomi merupakan studi tentang cara orang atau masyarakat menentukan atau menetapkan pilihan harga terendah dari sumber daya tertentu. Ekonomis juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya agar dapat menghasilkan berbagai jenis barang maupun jasa sehingga dapat didistribusikan sebagai keperluan konsumsi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Menurut pandangan Mahmudi (2016: 21) Ekonomis merupakan penghematan anggaran dalam proses memperoleh input atau pemasukan dari kegiatan yang sedang berlangsung. Membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat tingkat ekonomis dari sebuah kegiatan.

Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan suatu pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar.

Mardiasmo (2018:132), pernah mengemukakan tentang Efisiensi dimana menurutnya efisiensi dapat dapat dinilai melalui perbandingan antara output yang akan dihasilkan terhadap input yang akan digunakan (*cost of output*).

Jika dilihat dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi merupakan perbandingan antara pemakaian input yang minim untuk mencapai output yang maksimal, kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dapat dikatakan efisien jika nilai rasio perhitungan yang diperoleh semakin kecil.

Efektivitas

Menurut (Ravianto 2014: 367) efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombak dalam mengukur baik tidaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif, apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.



Mahmudi (2016: 21) Efektivitas merupakan gambaran tentang hubungan keterkaitan antara output dengan tujuan, disaat output memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sebuah organisasi terhadap sebuah pencapaian tujuan organisasi tersebut maka akan semakin efektif pula organisasi tersebut.

3. METODOLOGI

Ruang Lingkup Penelitian

Penulis meneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan untuk menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah khususnya di Aceh Barat dengan menggunakan pendekatan prinsip *value for money*.

Jenis dan sumber data

Sumber data sekunder menjadi pilihan yang digunakan penulis untuk meneliti tentang kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Jika dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya tentang data sekunder menjelaskan bahwa data sekunder biasa nya berupa catatan atau laporan yang disusun dan diarsip.

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diambil dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Aceh Barat dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif, yang menyajikan data dan juga menghitung kinerja dengan menggunakan metode *Value For Money* yang dinilai dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mahmudi, 2016).

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini menjelaskan tentang hasil kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dengan memakai perhitungan *Value For Money* yang terbagi menjadi empat yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas dan outcome. Sedangkan analisis kuantitatif adalah yang menganalisis dalam bentuk angka dengan menggunakan teori dan juga hasil dari penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama. Metode *Value for money* yang akan menjadi metode menghitung kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

Alat Analisis

Penulis menggunakan pengukuran *value for money* untuk mengukur kinerja organisasi pada sektor publik khususnya di Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan tiga rasio yaitu rasio ekonomis, efisiensi dan juga efektivitas

1) Rasio Ekonomis

Rasio ini biasa digunakan untuk mengatur pendapatan yang akan dibelanjakan agar dapat meminimalisir setiap pendapatan yang akan di gunakan



guna untuk menghindari pengeluaran yang boros serta kurang produktif. Dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dan target belanja menjadi cara untuk mengukur tingkat ekonomis anggaran sektor publik.

Berikut adalah rumus yang biasa digunakan untuk menghitung rasio ekonomi.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} = 100\%$$

Tabel 3.1
Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Kriteria Ekonomi
100%-atas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

2) Rasio efisiensi

Efisiensi adalah rasio yang pengukurannya memakai perbandingan output yang dihasilkan dengan input yang dipakai, jika hasil kerja atau suatu produk tertentu dapat dihasilkan oleh sektor publik dengan menggunakan sumber daya yang sangat rendah maka dapat dikatakan bahwa kegiatan dari sektor publik tersebut berhasil.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} = 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Efisien Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100%-atas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

3) Rasio efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pengukuran yang dapat menilai berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, jika berhasil maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah efektif. Namun rasio ini tidak dapat menggambarkan besar kecilnya biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan.



$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} = 100\%$$

Tabel 3.3
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Kriteria Efektivitas
100%-atas	Tidak Efektivitas
90%-100%	Kurang Efektifitas
80%-90%	Cukup Efektifitas
60%-80%	Efektifitas
Kurang dari 60%	Sangat Efektifitas

Batasan Operasional Variabel

Agar dapat lebih mudah untuk menentukan indikator dan juga skala dari sebuah variabel yang terdapat dalam sebuah penelitian maka peneliti membutuhkan operasional variabel. Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020-2021 yaitu:

Table 3.4
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Ekonomi	Ekonomis adalah perolehan input dengan harga terendah.	Realisasi pengeluaran Anggaran pengeluaran
Efisiensi	Efisiensi adalah hubungan input dan output barang dan jasa yang dibeli organisasi untuk mencapai output tertentu.	Realisasi belanja Anggaran pendapatan
Efektivitas	Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Di mana efektivitas di ukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output.	Realisasi pendapatan Anggaran pendapatan



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Value For Money

Untuk mengukur kinerja pemerintahan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020–2021 peneliti menggunakan laporan pendapatan dan belanja daerah, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dengan indikator value for money. Dengan rincian data APBD Kabupaten Aceh Barat yang sudah diolah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat

NO URU T	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		2020	2020
4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	100.518.750,00
4.1	PANDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	100.518.750,00
4.1.2	Retribusi Daerah	40.000.000,00	100.518.750,00
5	BELANJA DAERAH	119.231.996.072,00	107.403.432.317,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.747.938.431,00	10.547.808.525,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.924.917.515,00	6.032.680.135,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.799.408.916,00	4.425.128.390,00
5.1.5	Belanja Hibah	23.612.000,00	-
5.2	BELANJA MODAL	107.484.057.641,00	96.945.623.846,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	766.056.500,00	757.348.180,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	940.699.150,00	904.978.300,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.777.301.991,00	95.283.297.366,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(119.191.996.072,00)	(107.302.913.621,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(119.191.996.072,00)	(107.302.913.621,00)

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR kabupaten Aceh Barat tahun 2020

Tabel 4.2
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas PUPR
Kabupaten Aceh Barat

NO URU T	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		2021	2021
4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	136.188.155,00
4.1	PANDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	136.188.155,00
4.1.2	Retribusi Daerah	110.000.000,00	136.188.155,00
5	BELANJA DAERAH	181.562.705.937,00	164.070.732.479,54
5.1	BELANJA OPERASI	21.002.305.351,00	20.253.451.876,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.270.436.516,00	5.231.538.072,00



5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.614.799.835,00	6.059.126.354,00
5.1.5	Belanja Hibah	9.117.069.000,00	8.962.787.450,00
5.2	BELANJA MODAL	160.560.400.586,00	143.817.280.603,54
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	975.280.868,00	961.452.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.599.496.250,00	4.570.690.500,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.861.623.468,00	138.163.285.603,54
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	124.000.000,00	121.852.500,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(181.452.705.937,00)	(163.934.544.324,54)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(181.452.705.937,00)	(163.934.544.324,54)

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR kabupaten Aceh Barat tahun 2021

1) Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis dinyatakan berhasil jika dalam memperoleh sumber daya tertentu atau input dengan menggunakan harga terendah. Rasio ekonomis hanya fokus pada meminimalisir pengeluaran agar tidak boros.

$$\text{Rasio Ekonomi 2020} = \frac{107.403.432.317,00}{119.231.996.072,00} = 100\% = 90\%$$

$$\text{Rasio Ekonomi 2021} = \frac{164.070.732.479,54}{181.562.705.937,00} = 100\% = 90\%$$

Dapat kita lihat hasil persentase rasio ekonomi Dinas Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 – 2021 sebesar 90% angka tersebut cukup konsisten dan juga ekonomis. Saat pelaksanaan program Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat menggunakan sistem disiplin anggaran bahkan masih terus digunakan sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Sistem tersebut menjadi alternatif agar tidak terjadi booming pencairan anggaran dan dapat menekan angka pengeluaran, dan pencapaian tujuan pun lebih ekonomis.

2) Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan bagian dari value for money yang dapat mengukur rasio dengan output juga input, dan dapat dinyatakan berhasil hanya jika produk atau hasil kerja yang dicapai menggunakan sumber daya bahkan dana paling rendah (spending well).

$$\text{Rasio Efisiensi 2020} = \frac{107.403.432.317,00}{100.518.750,00} = 100\% = 143,075\%$$



$$\text{Rasio Efisiensi 2021} = \frac{164.070.732.479,54}{136.188.155,00} = 100\% = 120,474\%$$

Nilai rasio efisiensi Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020 sebesar 143,075% sedangkan tahun 2021 sebesar 120,474%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan atau tidak efisien. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan SDA yang telah tercantum dalam misi Kabupaten Aceh Barat.

3) Rasio efektivitas

Efektivitas adalah rasio yang hanya mempertimbangkan perolehan output dan hanya dapat mengukur berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi, suatu organisasi dapat dikatakan efektif hanya jika organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan nya.

$$\text{Rasio Efektivitas 2020} = \frac{181.562.705.937,00}{107.403.432.317,00} = 100\% = 169\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2021} = \frac{164.070.732.479,54}{119.231.996.072,00} = 100\% = 138\%$$

Nilai rasio efektivitas untuk menghitung kinerja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 sebesar 169% dan tahun 2021 sebesar 138%, yang artinya terjadi penurunan kinerja pemerintahan dari tahun 2020 sampai 2021 dengan kata lain kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih kurang efektif dalam memperbaiki kinerjanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari sedikit pembahasan diatas tentang metode value for money yang mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Aceh Barat di tahun 2020 - 2021, yang memakai tiga rasio perhitungan yaitu: rasio ekonomis dimana pada tahun 2020 - 2021 memiliki nilai sebesar 90% yang artinya kinerja pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sudah termasuk dalam kategori ekonomis, jika dilihat dari sudut pandang rasio efisiensi kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020 sebesar 143,075% dan 120,474% di tahun 2021 yang artinya kinerja pemerintahan mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori tidak efisien, dan jika dilihat dari



sudut pandang rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 – 2021 juga tidak jauh berbeda dengan rasio efisiensi, nilai efektivitas di tahun 2020 adalah 169% dan di tahun 2021 adalah 138%, dari kedua nilai tersebut sangat jelas terlihat penurunan nya, jadi dapat disimpulkan efektivitas kinerja karyawan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat masih kurang efektif dan banyak yang harus diperbaiki.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Untuk lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan agar mengetahui kepentingan penggunaan anggaran dan publik.
- 2) Senantiasa melakukan investigasi agar pengelolaan keuangan lebih sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa dewi. (2017). Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Diakses tanggal 16 September 2022.
- Ariel Sharon Sumenge. (2013). Jurnal EMBA : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa. Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses tanggal 16 September 2022.
- Ardila, Isna. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 15 No.1
- Brian (2013), Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Diakses tanggal 16 September 2022.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. Metode riset bisnis untuk bisnis & ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2016. Analisis Data. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Nazril, Naim. 2013. Jurnal: Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. Skripsi Universitas
- Hasanudin <http://repository.unhas.ac.id/handle/J23456789/6634>. Diakses tanggal 16 September 2022.
- Nurillah, As syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Intern,



- Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SAKD Kota Depok). Jurnal akuntansi.Vol.1, no1. Hal: 2337-3806. Diakses tanggal 16 September 2022.
- Putra. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. Jurnal Ilmiah. Universitas Bima Darma.
- Putong, Iskandar. 2013. Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sari, Nindy Cahya Feriska. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money(Studi Kasus Kabupaten Sumenap Tahun (2010-2013). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.Diakses Tanggal 16 September 2022.
- Sari Murni, R. (2016). Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik (Studi Pada Pemda Kabupaten Tulungagung). Jurnal Kompilek, 8(1). www.stieken.ac.id